

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN SEBAGAI INSTRUMEN *GOOD GOVERNANCE* PADA BUMDES DESA DULANG

Elva Tiara¹; Yadi Arodhiskara²; Muhammad Abdian Abdillah³; Ruslang T⁴

Universitas Muhammadiyah Parepare
Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 6, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
E-mail : elvatiara378@gmail.com (Koresponding)

Abstract: This study aims to analyze the implementation of the financial accounting system at a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Dulang Village, its role in supporting good governance, and the challenges and efforts to strengthen the system. This study employed a qualitative descriptive approach. Informants were selected purposively and included the Village Head, BUMDes Director, Treasurer, and Chairperson of the Village Consultative Body (BPD). Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model with source, technique, and time triangulation. The findings show that BUMDes financial accounting remains predominantly manual, while computers are mainly used to prepare financial reports. Although an accounting application is available, its utilization is limited by inadequate human resource competencies and insufficient training. Nevertheless, the accounting system supports good governance through transparent reporting, accountable financial management, stakeholder participation in supervision, and regulatory compliance. Strengthening managerial competencies, technical assistance, training, and gradual adoption of technology-based accounting are essential to improve effective, transparent, accountable, and sustainable financial governance.

Keywords: *Financial Accounting System; Village-Owned Enterprises (Bumdes); Good Governance; Village Governance; Accountability*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi desa yang dibentuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Futri et al. 2025). Keberadaan BUMDes menjadi bagian penting dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes tidak hanya dituntut mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset desa (Ariyanti, 2025).

Keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem

akuntansi keuangan yang diterapkan. Sistem akuntansi keuangan berfungsi sebagai mekanisme pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial, evaluasi kinerja, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

Sistem akuntansi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, pengelolaan keuangan BUMDes tidak hanya berorientasi pada ketertiban administrasi, tetapi juga pada

terciptanya tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa dan masyarakat (Abdillah et al., 2025) Implementasi sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan. (Lestari et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meskipun masih terdapat keterbatasan kompetensi pengelola. Sementara itu, (Masse et al., 2025) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* pada BUMDes belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat.

(Hafidz & Rifandi, 2023) juga menemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis *Microsoft Excel* dapat meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola BUMDes. Namun, penelitian terdahulu masih cenderung membahas sistem akuntansi keuangan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, atau pemanfaatan teknologi secara terpisah. Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yang menghubungkan implementasi sistem akuntansi keuangan dengan perannya sebagai instrumen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* secara lebih menyeluruh, khususnya pada BUMDes yang berada dalam tahap transisi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis teknologi.

Sistem akuntansi keuangan dalam perspektif tata kelola tidak hanya dipandang sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung terlaksananya prinsip *good governance* secara nyata. Sistem akuntansi yang memadai dapat menghasilkan informasi keuangan yang valid dan dapat dipercaya sehingga pengurus BUMDes mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana serta hasil usaha secara terukur.

Transparansi dapat didukung melalui ketersediaan dan penyampaian informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, sedangkan akuntabilitas dapat diperkuat melalui pencatatan transaksi, dokumentasi bukti transaksi, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur. Selain itu, tersedianya informasi keuangan yang memadai dapat mendukung partisipasi dan pengawasan oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan menjadi penghubung antara aktivitas usaha BUMDes dan mekanisme pertanggungjawaban kepada publik (Fadilah & Wijayanto, 2025).

Penerapan prinsip *good governance* menjadi penting karena BUMDes mengelola dana dan aset desa yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Transparansi diperlukan untuk menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan partisipasi diperlukan untuk mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Selain itu, efektivitas dan efisiensi diperlukan agar tujuan pengelolaan BUMDes dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat dan optimal.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut perlu didukung oleh sistem akuntansi keuangan yang mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Apabila sistem akuntansi tidak berjalan secara memadai, kualitas pencatatan, pelaporan, pengawasan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dapat mengalami hambatan yang berpotensi memengaruhi kualitas tata kelola BUMDes secara keseluruhan (Ariski & Asy'ari, 2022).

BUMDes Desa Dulang, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat perbedaan

informasi mengenai sistem pencatatan keuangan yang diterapkan. Kepala Desa menyatakan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual, sedangkan aparat desa lainnya menyebutkan bahwa BUMDes telah mulai menggunakan sistem informasi akuntansi, meskipun belum diketahui secara pasti bentuk maupun aplikasi yang digunakan.

Perbedaan informasi tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam penerapan sistem, baik dari aspek penggunaan teknologi, prosedur pencatatan, maupun pemahaman pengelola terhadap sistem yang dijalankan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang masih berada pada tahap transisi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis teknologi.

Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan serta bagaimana sistem tersebut mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

Implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang juga memberikan kontribusi terhadap penerapan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah desa dan forum musyawarah desa sehingga informasi mengenai pengelolaan keuangan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti transaksi serta dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan BUMDes.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi

keuangan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola BUMDes, meskipun masih diperlukan penguatan dalam pemanfaatan sistem berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas pengelola.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis implementasi sistem akuntansi keuangan, tetapi juga mengkaji perannya sebagai instrumen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada BUMDes yang masih berada pada tahap transisi dari sistem pencatatan manual menuju sistem berbasis teknologi. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi pengelola serta upaya penguatan sistem akuntansi keuangan dalam mendukung tata kelola BUMDes yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang, mengkaji perannya dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penguatan sistem akuntansi keuangan pada BUMDes.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang serta perannya dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, kondisi, pengalaman, dan makna yang muncul dalam pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan situasi alamiah di lapangan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan

pada BUMDes Desa Dulang telah mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam proses penyampaian informasi keuangan, pencatatan dan pelaporan transaksi, keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pengawasan, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

Transparansi

Penerapan prinsip transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi dan laporan keuangan kepada Pemerintah Desa serta masyarakat dalam forum Musyawarah Desa. Penyampaian laporan tersebut menjadi bentuk keterbukaan informasi mengenai perkembangan kegiatan dan pengelolaan keuangan BUMDes. Kepala Desa menyatakan:

"Iya, laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua BUMDes yang menjelaskan:

"Laporan keuangan kami sampaikan kepada pemerintah desa dan dipaparkan pada saat Musyawarah Desa."

Selain itu, Bendahara BUMDes menyampaikan bahwa laporan keuangan disusun secara berkala dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan:

"Laporan keuangan dibuat setiap periode dan disampaikan kepada Ketua BUMDes, pemerintah desa, serta dipaparkan dalam Musyawarah Desa."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, transparansi pengelolaan BUMDes diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan kepada Pemerintah Desa dan pemaparan informasi dalam forum Musyawarah Desa. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan pengelolaan keuangan BUMDes.

Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas tercermin melalui pencatatan transaksi berdasarkan bukti yang sah, penyusunan laporan keuangan secara berkala, serta pelaksanaan pemeriksaan dan evaluasi sebelum laporan disampaikan kepada Pemerintah Desa. Ketua BPD menyatakan:

"Pengurus BUMDes bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas."

Kepala Desa juga menjelaskan:

"Iya, laporan keuangan dievaluasi setiap akhir periode dan diperiksa bersama pemerintah desa."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara BUMDes:

"Iya, laporan selalu diperiksa sebelum disampaikan kepada pemerintah desa."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan didukung oleh penyusunan laporan secara berkala, pemeriksaan laporan, serta evaluasi yang dilakukan bersama Pemerintah Desa. Setiap transaksi juga didukung oleh bukti transaksi dan dokumen pendukung yang digunakan sebagai dasar dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUMDes.

Partisipasi

Penerapan prinsip partisipasi diwujudkan melalui keterlibatan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam forum Musyawarah Desa serta proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan BUMDes. Forum Musyawarah Desa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan pengelolaan keuangan BUMDes. Kepala Desa menyatakan:

"Iya, laporan keuangan dibahas secara terbuka dalam Musyawarah Desa agar masyarakat mengetahui perkembangan BUMDes."

Ketua BPD juga menjelaskan:

"Musyawarah Desa menjadi forum utama untuk membahas laporan keuangan secara terbuka."

Selain melalui forum musyawarah,

BPD terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian masukan terhadap pengelolaan BUMDes. Kepala Desa menyatakan:

“BPD ikut melakukan pengawasan serta memberikan masukan apabila terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan prinsip partisipasi terlihat melalui keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam penyampaian informasi, pengawasan, serta evaluasi kegiatan BUMDes. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya dilaksanakan oleh pengurus, tetapi juga melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat.

Kepatuhan

Prinsip kepatuhan terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Kepala Desa menyatakan:

“Iya, BUMDes Desa Dulang sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis terkait pengelolaan keuangan. SOP tersebut menjadi pedoman bagi pengurus dalam melaksanakan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta menciptakan pengelolaan yang tertib dan akuntabel.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ketua BUMDes:

“Iya, kami sudah memiliki SOP tertulis sebagai pedoman dalam mengelola keuangan BUMDes. Seluruh pengurus berusaha mengikuti SOP tersebut mulai dari pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan agar pengelolaannya lebih tertib dan sesuai dengan aturan.”

Berdasarkan hasil penelitian, SOP telah digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUMDes. Kepatuhan terhadap prosedur juga didukung melalui pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Desa dan BPD untuk memastikan bahwa kegiatan

BUMDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dalam forum Musyawarah Desa, akuntabilitas terlihat melalui pencatatan berdasarkan bukti transaksi serta penyusunan dan evaluasi laporan keuangan, partisipasi ditunjukkan melalui keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat, sedangkan kepatuhan diwujudkan melalui penerapan SOP dalam proses pengelolaan keuangan.

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Pada Bumdes, Baik Yang Masih Manual Maupun Yang Telah Menggunakan Sistem Berbasis Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang masih didominasi oleh sistem pencatatan manual. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas berdasarkan bukti transaksi, seperti nota, kuitansi, dan bukti transfer. Bukti transaksi tersebut kemudian disimpan dan diarsipkan sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan laporan keuangan serta sebagai dasar pertanggungjawaban atas kegiatan BUMDes.

Komputer telah digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan, tetapi belum digunakan sebagai bagian dari sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan telah diterapkan melalui proses pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, pengelompokan data, dan penyusunan laporan keuangan, meskipun sebagian besar proses masih dilakukan secara manual.

Penerapan sistem pencatatan manual tetap mendukung keteraturan administrasi

keuangan karena setiap transaksi dicatat berdasarkan bukti yang tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengurus berupaya melakukan pencatatan secara rutin agar seluruh transaksi dapat terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Namun, proses pencatatan manual masih membutuhkan ketelitian yang tinggi dan waktu yang lebih lama dalam pengolahan data serta penyusunan laporan. Oleh karena itu, sistem manual dapat mendukung ketertiban administrasi apabila diterapkan secara konsisten, tetapi masih memiliki keterbatasan dari aspek kecepatan dan efisiensi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Lestari et al., 2025) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi pada BUMDes Purwa Binangkit masih bersifat semi-manual melalui penggunaan buku kas umum dan aplikasi sederhana. Meskipun belum sepenuhnya berbasis teknologi, sistem tersebut memberikan dampak positif terhadap keteraturan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan serta mendukung peningkatan akuntabilitas melalui pelaporan berkala kepada Pemerintah Desa dan forum masyarakat. Kesamaan tersebut terlihat pada penggunaan pencatatan manual sebagai dasar pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan.

Pada BUMDes Desa Dulang, pencatatan transaksi juga masih dilakukan menggunakan buku kas dan didukung oleh bukti transaksi yang diarsipkan sebagai dasar pelaporan serta pertanggungjawaban. Namun, terdapat perbedaan antara hasil penelitian ini dan penelitian (Lestari et al., 2025). Pada BUMDes Purwa Binangkit, aplikasi sederhana telah digunakan sebagai bagian dari penerapan sistem akuntansi meskipun sistemnya masih bersifat semi-manual.

Sementara itu, BUMDes Desa Dulang telah memiliki aplikasi pencatatan keuangan, tetapi aplikasi tersebut belum digunakan dalam kegiatan operasional karena pengurus belum memperoleh pelatihan mengenai penggunaannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Desa Dulang

masih berada pada tahap transisi menuju penerapan sistem berbasis teknologi. Keberadaan aplikasi belum memberikan manfaat secara optimal karena belum didukung oleh kesiapan kompetensi pengurus.

Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian (Hafidz & Rifandi, 2023) yang menunjukkan bahwa BUMDes Rukun Santoso telah menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis *Microsoft Excel* secara terintegrasi. Melalui sistem tersebut, data dari setiap unit usaha dapat diinput dan diolah sehingga penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca dapat dilakukan secara lebih mudah. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi tersebut mendukung proses pengolahan data dan meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

Berbeda dengan BUMDes Rukun Santoso, penggunaan teknologi pada BUMDes Desa Dulang masih terbatas pada penggunaan komputer untuk membantu penyusunan laporan akhir. Proses pencatatan transaksi belum dilakukan melalui aplikasi secara terintegrasi sehingga pengolahan data masih dilakukan secara bertahap. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pada BUMDes Desa Dulang belum optimal. Meskipun demikian, ketersediaan aplikasi pencatatan keuangan menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan sistem akuntansi berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil tersebut, implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes dapat diterapkan melalui berbagai tingkat penggunaan, mulai dari sistem manual, semi-manual, hingga sistem berbasis teknologi yang terintegrasi. Sistem manual tetap dapat mendukung keteraturan pencatatan dan penyusunan laporan apabila dilaksanakan secara konsisten serta didukung oleh bukti transaksi dan prosedur yang jelas. Namun, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kecepatan pengolahan data, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, dan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu,

penerapan sistem berbasis teknologi pada BUMDes Desa Dulang perlu dilakukan secara bertahap melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi pengurus agar aplikasi yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sistem Akuntansi Keuangan sebagai Instrumen *Good Governance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang telah berperan sebagai instrumen dalam mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Peran tersebut terlihat melalui pencatatan transaksi berdasarkan bukti yang sah, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, keterlibatan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pengelolaan keuangan. Dengan demikian, sistem akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, pengawasan, dan kepatuhan terhadap prosedur.

Pada aspek transparansi, sistem akuntansi menyediakan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar penyampaian laporan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat melalui Musyawarah Desa. Penyampaian laporan tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dan pengelolaan keuangan BUMDes.

Pada aspek akuntabilitas, sistem akuntansi mendukung proses pertanggungjawaban melalui pencatatan transaksi berdasarkan bukti yang sah, penyimpanan dokumen pendukung, penyusunan laporan keuangan secara berkala, serta pemeriksaan dan evaluasi laporan sebelum disampaikan kepada Pemerintah Desa. Proses tersebut memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan adanya catatan dan bukti transaksi yang lengkap, pengelolaan keuangan dapat diperiksa dan dievaluasi berdasarkan informasi yang

tersedia.

Pada aspek partisipasi, informasi keuangan yang dihasilkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan digunakan sebagai dasar keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam proses pengawasan serta evaluasi. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui forum Musyawarah Desa, pembinaan oleh Pemerintah Desa, serta pengawasan dan pemberian masukan oleh BPD. Dengan tersedianya informasi keuangan, pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan BUMDes dan memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan keuangannya.

Pada aspek kepatuhan, pengelolaan keuangan BUMDes telah mengacu pada SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan transaksi, penyimpanan bukti transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaksanaan pertanggungjawaban. Penerapan SOP memberikan arah bagi pengurus dalam menjalankan tugas serta mendukung konsistensi dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Kepatuhan terhadap prosedur juga diperkuat melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian (Masse et al., 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan *good governance* pada BUMDes telah berjalan melalui pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa penerapannya belum optimal karena keterbatasan partisipasi masyarakat, transparansi informasi yang belum merata, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Perbedaan dengan penelitian (Masse et al., 2025) terlihat pada pelaksanaan transparansi dan partisipasi di BUMDes Desa Dulang. Pada penelitian ini, informasi

keuangan telah disampaikan melalui Musyawarah Desa dan BPD telah terlibat dalam proses pengawasan serta pemberian masukan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat masih perlu terus diperkuat agar tidak hanya terbatas pada penerimaan informasi dalam forum musyawarah, tetapi juga berkembang melalui keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan (Chain et al., 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan BUMDes. Penerapan prinsip tata kelola dapat mendukung keteraturan pengelolaan keuangan dan meningkatkan keberlanjutan kegiatan usaha BUMDes. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal dan keterbukaan informasi masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola tidak hanya memerlukan penyusunan laporan dan pelaksanaan prosedur, tetapi juga perlu didukung oleh keterlibatan masyarakat serta keterbukaan informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil tersebut, sistem akuntansi keuangan dapat dipahami sebagai instrumen *good governance* karena menyediakan informasi yang mendukung transparansi, menjadi dasar pertanggungjawaban dalam penerapan akuntabilitas, menyediakan informasi bagi proses partisipasi dan pengawasan, serta mendukung kepatuhan terhadap prosedur melalui penerapan SOP. Dengan demikian, penguatan sistem akuntansi tidak hanya bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola BUMDes yang lebih terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala dan Upaya Penguatan Sistem Akuntansi BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa

Dulang berkaitan dengan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menggunakan sistem berbasis teknologi. BUMDes telah memiliki aplikasi pencatatan keuangan, tetapi aplikasi tersebut belum diterapkan karena pengurus belum memperoleh pelatihan mengenai penggunaan dan pengoperasiannya. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Dengan demikian, ketersediaan aplikasi belum dapat memberikan manfaat secara optimal karena belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan pengurus sebagai pengguna sistem.

Selain keterbatasan kompetensi, jumlah pengurus yang tersedia juga memengaruhi pelaksanaan pengelolaan administrasi dan keuangan BUMDes. Keterbatasan jumlah pengurus menyebabkan pembagian tugas belum sepenuhnya optimal sehingga beberapa pengurus menjalankan lebih dari satu tanggung jawab. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban kerja dan memengaruhi kelancaran proses pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan kegiatan usaha. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi tidak hanya berkaitan dengan penerapan aplikasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta pembagian tugas yang jelas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BUMDes perlu melakukan peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan dan pendampingan teknis mengenai penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Pelatihan diperlukan agar pengurus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi, sedangkan pendampingan dapat membantu pengurus menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan. Penerapan sistem berbasis teknologi dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan aplikasi untuk pencatatan transaksi dan pengelolaan buku

kas, kemudian dikembangkan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan secara lebih terintegrasi.

Upaya tersebut sejalan dengan penelitian (Rohmah et al. 2025) yang menunjukkan bahwa pendampingan melalui pelatihan, asistensi teknis, dan penyusunan instrumen administrasi dapat meningkatkan pemahaman pengurus terhadap prosedur administrasi keuangan. Pendampingan juga menghasilkan format pencatatan yang lebih sistematis serta meningkatkan komitmen pengurus dalam menerapkan tata kelola yang lebih tertib dan profesional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem akuntansi tidak hanya membutuhkan ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan proses peningkatan kapasitas dan pendampingan agar pengurus mampu menerapkan sistem secara konsisten.

Selain pelatihan dan pendampingan, penguatan sistem perlu didukung melalui penataan pembagian tugas dan peningkatan koordinasi antar-pengurus. Pembagian tugas yang jelas dapat mengurangi beban kerja yang menumpuk pada satu pengurus serta meningkatkan keteraturan dalam pencatatan transaksi, penyimpanan dokumen, dan penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Desa juga dapat memberikan pembinaan serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan penerapan sistem dan memberikan dukungan apabila pengurus menghadapi kesulitan dalam penggunaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan sistem akuntansi pada BUMDes Desa Dulang perlu dilakukan melalui pelatihan penggunaan aplikasi, pendampingan teknis, penataan pembagian tugas, peningkatan koordinasi antar-pengurus, serta pembinaan dan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pemanfaatan sistem berbasis teknologi secara lebih optimal, meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pelaporan, mengurangi risiko kesalahan, serta memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan dalam pengelolaan BUMDes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem akuntansi keuangan pada BUMDes Desa Dulang telah dilaksanakan melalui pencatatan transaksi, penyimpanan dan pengarsipan bukti transaksi, serta penyusunan laporan keuangan. Namun, proses pencatatan masih didominasi secara manual, sedangkan pemanfaatan sistem berbasis teknologi belum berjalan optimal meskipun aplikasi pencatatan keuangan telah tersedia.

Sistem akuntansi keuangan juga berperan sebagai instrumen dalam mendukung penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi melalui penyampaian informasi keuangan, akuntabilitas melalui pencatatan dan pertanggungjawaban berdasarkan bukti transaksi, partisipasi melalui keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat dalam pengawasan, serta kepatuhan melalui penerapan SOP dalam pengelolaan keuangan.

Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kompetensi pengurus dalam mengoperasikan aplikasi serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menyebabkan pembagian tugas belum optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntansi perlu dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penerapan aplikasi secara bertahap, penataan pembagian tugas, peningkatan koordinasi antar-pengurus, serta pembinaan dan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan dan pelaporan keuangan serta memperkuat penerapan *good governance* secara berkelanjutan pada BUMDes Desa Dulang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, S., Arodhiskara, Y., & Jumriani. (2025). Pengaruh transparansi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa pada desa tasiwalie kabupaten pinrang. *DECISION: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(Dd), 140–

149.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31850/decision.v6i1.3568>
- Ariski, N. A., & Asy'ari, M. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “ Jaya Tirta.” *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 230–249.
- Ariyanti, T. P. (2025). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Persepektif Good Governance (BUMDes Subur Makmur) di Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(03), 153–168.
- Chain, F. M., Rozari, P. E. de, Fa'ah, Y. S., & Ndoen, W. M. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. *Glory: Jurnal Ekonomi&Ilmu Sosial ANALISIS*, 1451–1462.
<https://doi.org/https://doi.org/10.70581/glory.v6i5.19673>
- Fadilah, L. N., & Wijayanto. (2025). Towards Good Governance in Indonesia : Implementation of Good Governance at the Village Level. *Journal of Governance and Social Policy*, 6(1), 147–163.
<https://doi.org/10.24815/gaspol.v6i1.45936>
- Futri, Darmawan, Fatimah, Tiara, E., & Syukri, F. (2025). *Assistance in Bumdes Financial Management in Strengthening Village Agricultural Potential*. 1(2), 62–69.
- Hafidz, A. R., & Rifandi, M. (2023). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BUMDes Rukun Santoso di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 336–345.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2437>
- Lestari, S. A., Ismatullah, I., & Eriswanto, E. (2025). Analisis Sistem Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes Purwa Binangkit (Studi Kasus Pada Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2529–2542.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27575>
- Masse, N., Igrisa, I., & Nani, Y. N. (2025). Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. *Research Review Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i2.262>
- Rohmah, R. R., Asror, Z., Purwanto, & Wafiroh, L. N. (2025). Pendampingan Penguatan Tata Kelola dan Administrasi Keuangan pada BUMDes Raharja Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. *Jurnal Kemitraan Masyarakat*, 2(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/jkm.v2i4.2582>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.